

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi dengan judul efektivitas pengawasan pajak sarang burung walet di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan masalah yang terjadi adalah bahwa masih sulitnya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam menarik pajak sarang burung walet, dikarenakan berbagai faktor salah satunya masih minimnya pemilik bangunan sarang burung walet yang memiliki izin mendirikan bangunan sarang burung walet, pendapatan dari sarang burung yang tidak menentu juga dikarenakan tempat yang tidak memadai, Terlebih bangunan sarang burung walet yang ada di kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara. Dalam hal ini dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku dinas pendapatan yang menarik dibidang pajak juga sebagai pengawas dari suatu peraturan daerah yang mana telah diterbitkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode normatif sosiologi dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil peneliti yang diperoleh bahwasannya masih lemah tingkat kesadaran pemilik sarang atau penguasa sarang burung walet untuk membayar pajak sarang burung walet, juga masih lemah penerapan peraturan yang dilakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terlebih kurangnya sosialisasi tentang perda nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet terutama sosialisasi ditingkat kecamatan hingga ketinggian desa, sosialisasi dilakukan dengan bekerja sama pada pada pihak kecamatan maupun pada pihak desa, sehingga sosialisai dapat berjalan dengan efektif. Dinas pendapatan pengeloaan keuang dan aset daerah berupaya melakukan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet supaya terciptanya suatu efektivitas hukum.

Satuan polisi pamong praja kabupaten kayong utara selaku penegak peraturan daerah belum melakukan kewajibannya memberikan sanksi berupa penyegelan maupun penggusuran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin, terutama pada bangunan sarang burung walet yang ada dikabupaten kayong utara, tindakan yang tegas belum sama sekali dilakukan, sanksi sampai saat ini hanya berupa teguran dan surat pemanggilan kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB.

Kata kunci : pengawasan, izin mendirikan bangunan (IMB), sanksi. Peraturan daerah

ABSTARCT

This writing is motivated by the title of the effectiveness of supervision of swallow nest taxes in Simpang Hilir District, Kayong Utara Regency, based on the results of research that the author has done the problem that occurs is that it is still difficult for the regional financial and asset management revenue service to collect swallow nest taxes, because various factors, one of which is the lack of swallow nest building owners who have permits to build swallow nest buildings, uncertain income from bird nests is also due to inadequate places, especially swallow nest buildings in the Simpang downstream district, North Kayong Regency. In this case, the regional financial and asset management revenue service as an attractive revenue agency in the tax sector is also a supervisor of a regional regulation which has been issued by regional regulation number 12 of 2011 concerning swallow nest tax. In this paper, the author uses a sociological normative method with a descriptive analysis approach, which is a research conducted by describing the actual situation that occurred at the time the research was conducted so that conclusions can be drawn with respect to the problem under study.

The results of the researchers obtained that the level of awareness of the owner of the nest or the owner of the swallow's nest to pay the swallow's nest tax is still weak, and the application of regulations carried out by the regional financial and asset management revenue department is still weak. Moreover, the lack of socialization regarding regional regulation number 12 of 2011 regarding swallow nest tax, especially socialization at the sub-district level to the village level, socialization is carried out in collaboration with the sub-district and village parties, so that the socialization can run effectively. The regional financial and asset management revenue service seeks to periodically disseminate local regulations regarding swallow nest taxes in order to create a legal effectiveness.

The civil service police unit of North Kayong Regency as the enforcer of regional regulations has not carried out its obligation to provide sanctions in the form of sealing or eviction of buildings that do not have permits, especially on the swallow's nest building in North Kayong Regency. This is only in the form of a warning and a summons to the building owner who does not have an IMB.

Keywords: supervision, building permits (IMB), sanctions. Local regulation